

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan dan budaya. Pelaksanaan pembangunan selalu dicirikan oleh adanya perubahan-perubahan, kebijakan-kebijakan, maupun target yang akan dicapai. Dalam upaya pencapaian tujuan tersebut, maka perlu adanya suatu kondisi kehidupan bangsa dan negara yang cukup mantap di segala bidang yang diarahkan kepada tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan pada masa pembangunan ini pemerintah sedang melaksanakan pembangunan dalam segala bidang yang meliputi semua aspek kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan budaya. Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat perlu diperkokoh dan dimantapkan secara berkesinambungan melalui upaya dan langkah-langkah pembinaan dan pengembangan yang intensif dan terpadu. Hal ini perlu dilakukan supaya koperasi tetap hidup dan mampu bersaing dengan dua pelaku ekonomi lainnya yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Dari kedua pelaku ekonomi tersebut koperasi diharapkan lebih berperan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, seperti tertuang dalam Undang-undang Republik

Indonesia No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian Bab II pasal 3, yaitu :

“Koperasi bertujuan memajukan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Sebagai organisasi ekonomi, koperasi diharapkan dapat mengembangkan usahanya dengan bentuk kegiatan ekonomi yang tidak terlepas dari kepentingan anggota dengan cara memberikan pelayanan yang optimum kepada anggota. Pelayanan merupakan satu hal yang sangat berkaitan erat dengan kegiatan usaha koperasi dan juga menggambarkan kedekatan hubungan koperasi dalam memberikan manfaat bagi para anggotanya.

Hal ini mengandung arti bahwa perekonomian Indonesia disusun berdasar atas asas kekeluargaan dan menitikberatkan pada kesejahteraan ekonomi dan sosial, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran orang banyak. Bangun usaha yang sesuai dengan asas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Pengertian koperasi yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 mengenai Ketentuan Umum Perkoperasian pasal 1 ayat 1, yaitu : **“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.** Berdasarkan definisi koperasi tersebut, dimana koperasi merupakan suatu lembaga ekonomi, diharapkan dapat berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan cara mampu

berperan secara nyata dalam melayani kepentingan ekonomi para anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok adalah koperasi primer dengan badan hukum No. 518/2615/BH/PAD/2001 merupakan lembaga ekonomi yang berbentuk koperasi dengan jenis usaha utamanya adalah simpan pinjam yang berdiri pada tahun 30 Januari 1982, dengan pendiri Bapak Sianipar dan Bapak Johan Edmond dan beranggotakan para Pedagang di wilayah Perumnas Depok. Koperasi ini berlokasi di jalan Raya Nusantara Pancoran Mas Depok. Koperasi Pedagang Pusat Perbelanjaan Depok (KPPD) senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya seperti menyediakan fasilitas yang baik, ruangan yang nyaman, jam kerja yang sesuai dan lain sebagainya.

Jumlah keanggotaan KPPD berdasarkan data yang diperoleh cenderung mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya mengenai perkembangan anggota dapat dilihat pada tabel berikut .

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Anggota KPPD.

No	Anggota		
	Tahun	Jumlah (orang)	Penurunan (%)
1	2014	248	-
2	2015	244	(1,61)
3	2016	243	(0,40)
4	2017	240	(1,23)

Sumber : Laporan RAT KPPD 2013-2017.

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah anggota KPPD dari tahun ke tahun mengalami penurunan, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1,61%, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,40%, dan juga pada tahun 2016 sampai tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,23%.

Tabel 1.2 Perkembangan Partisipasi anggota dalam meminjam pada KPPD.

No	Tahun	Anggota yang meminjam	Total Dana Pinjaman (Rp)	Modal Koperasi (Rp)	Persentasi (%)
1	2014	96	1.895.600.000,00	3.822.945.777,19	3,20
2	2015	98	1.869.800.000,00	4.494.875.734,01	3,96
3	2016	97	2.253.520.000,00	5.147.685.053,53	3,92
4	2017	128	2.528.700.000,00	5.016.652.727,21	4,33

Sumber : Laporan RAT KPPD 2014-2017.

Dari tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah anggota yang meminjam ke koperasi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Tapi berdasarkan data diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah pinjaman anggota sangat kecil padahal kekayaan yang ada atau modal yang tersedia di koperasi untuk dan pinjaman sangat besar.

Berdasarkan dengan tabel di atas maka peneliti melakukan survey pendahuluan dengan tujuan agar dapat mengetahui penilaian anggota atau yang dirasakan oleh anggota terhadap pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang

diharapkan berpengaruh atau tidak untuk meningkatkan partisipasi anggota untuk melakukan pinjaman pada KPPD.

Pelayanan koperasi yang optimal dapat diwujudkan dengan memberikan pemahaman pada anggota tentang manfaat pinjaman yang disediakan oleh koperasi untuk mengembangkan usaha anggota demi meningkatkan nilai ekonomi anggota itu sendiri. Pada KPPD ditemukan partisipasi anggota dalam meminjam ke koperasi sangat kecil, padahal latar belakang KPPD ini memiliki modal yang tinggi. Karena kurangnya partisipasi anggota dalam meminjam ke koperasi mengakibatkan banyaknya dana yang mengendap.

Sumber modal dari unit simpan pinjam diatas bersumber simpanan anggota, alokasi dari SHU sebesar 30% dan juga bersumber dari unit usaha yang di kelaolah koperasi seperti retribusi harian meliputi : los/kios, kebersihan, penerangan ruangan, keamanan dan air. Dan juga terdapat sumber lain yang menambah sumber modal koperasi yaitu dari mitra koperasi antara lain : penyewaan ruang ATM, ruang fitness, MCK, kantin, parkir dan juga anjungan promosi.

Hal ini menjadi sangat penting bagi pengurus koperasi guna dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan koperasi terutama dalam hal meminjam.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penelitian ini diberi judul : **“Analisis Pelayanan Koperasi Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Anggota Untuk Melakukan Pinjaman”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan unit usaha simpan pinjam pada KPPD?
2. Bagaimana tanggapan dan harapan anggota terhadap pelayanan yang diberikan KPPD?
3. Upaya-upaya apa saja yang seharusnya dilakukan koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota dalam meminjam?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan pelayanan koperasi dengan partisipasi anggota dalam upaya meningkatkan pinjaman terhadap koperasi. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan Unit Usaha Simpan Pinjam pada KPPD?
2. Bagaimana tanggapan dan harapan anggota terhadap pelayanan yang diberikan KPPD?
3. Upaya apa saja yang harusnya dilakukan koperasi dalam meningkatkan partisipasi anggota dalam meminjam ke KPPD.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang akan di laksanakan ini diharapkan memberikan manfaat bagi aspek :

- 1) Aspek Guna Laksana
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumber informasi bagi pengurus KPPD, yang selanjutnya dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam memberikan kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan dimasa yang akan datang.

- b) Anggota, yaitu agar lebih mengerti tentang peran, tugas dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai anggota dalam rangka menunjang kegiatan usaha koperasi

2) Aspek Pengembangan Ilmu

- a) Penulis, yaitu sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang Perkoperasian baik secara teoritis maupun praktis
- b) Peneliti lain, yaitu sebagai bahan informasi dalam melakukan penelitian lebih lanjut
- c) Pengembangan ilmu manajemen perkoperasian.



IKOPIN